



TABURAN 'PEMANIS' KALA PPN DIKEREK 12 PERSEN

Listrik Didiskon 50 Persen hingga Bagi Beras 10 Kg

Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Taburan 'pemanis' juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi kebijakan yang dikhawatirkan menjadi 'pil pahit' bagi daya beli masyarakat tersebut. Sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50 persen sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin dijanjikan. Dengan langkah tetriliu diperkirakan potensi tambahan penerimaan negara sepanjang tahun depan mencapai Rp 75 triliun. Sementara itu, total estimasi anggaran yang dikeluarkan untuk 15 insentif fiskal dalam paket kebijakan ekonomi akan mencapai Rp 40 triliun. Artinya, masih ada setoran ke 'dompet' negara. Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak memang menjadi fokus untuk mendorong program Asta Cita pemerintahan Prabowo. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditengarai perlu pendanaan jumbo, untuk tahun depan saja alokasinya Rp 71 triliun dalam APBN 2025. "Yang mampu membantu dan membayar, yang tidak mampu dia dibantu dan dilindungi," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.



Baca Hal 11....



BARANG DAN JASA MEWAH YANG AKAN DIKENAI PPN 12 PERSEN MULAI 1 JANUARI 2025

- Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
- Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
- Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
- Beras premium
- Buah-buahan premium
- Ikan premium, seperti salmon dan tuna
- Udang dan crustasea premium, seperti king crab
- Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan

**POLITIC (Hal.3)
Resmi Dipecat PDIP:
Kemana Jokowi,
Gibran dan Bobby
Berlabuh?**

Berikut adalah rincian insentif fiskal dan non-fiskal pemerintah untuk 2025 yang dipersingkat per poin:

- PPN DTP Minyak Goreng (MINYAKITA): 1%, anggaran Rp 900 miliar.
- Bantuan Beras: 10 kg/bulan untuk 16 juta keluarga, anggaran Rp 4,6 triliun.
- PPN DTP Tepung Terigu: 1%, anggaran Rp 900 miliar.
- Diskon Listrik 50%: Untuk pelanggan 2.200 VA atau lebih rendah, anggaran Rp 10,8 triliun.
- PPN DTP Gula Industri: 1%, anggaran Rp 437 miliar.
- PPN DTP Properti: 100% (Jan-Jun) dan 50% (Jul-Dec), anggaran Rp 3 triliun.
- PPN DTP Mobil Listrik: 10% untuk EV roda empat dan 5% untuk EV bus, anggaran Rp 2,8 triliun.



- PPNBM DTP EV: 100% untuk impor dan produksi dalam negeri, anggaran Rp 2,52 triliun
- PPNBM DTP Kendaraan Hybrid: 3%, anggaran Rp 840 miliar.
- Pembebasan Bea Masuk EV: Untuk CBU, estimasi anggaran belum tertulis.
- Pph Pasal 21 DTP Padat Karya: Gaji hingga Rp 10 juta, anggaran Rp 680 miliar.
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan: 60% upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp 2,4 juta, estimasi anggaran belum tercatat.
- Pph Final UMKM: Tarif 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp 3,6 miliar.
- Pembiayaan Industri Padat Karya: Subsidi bunga 5% untuk Kredit Investasi, anggaran Rp 220-260 miliar, total kredit Rp 20 triliun.

Menyoal Timbal Balik Pemulangan Napi RI Buka Peluang Minta Filipina Pindahkan WNI Penyelundup Senpi

JAKARTA - Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Ahmad Usmarwi Kaffah menjamin ada prinsip timbal balik terkait pemindahan narapidana dari Indo-nesia ke negara asal. Dia mengata-kan pemerintah negara yang warganya telah dikembalikan juga harus melakukan hal serupa jika Indonesia meminta pemindahan napi.

"Pertama harap diingat prinsip yang saya garis bawahi tadi adalah resiprokal atau timbal balik jadi dengan adanya transfer of prisoners ini, nanti pada gilirannya juga treatment yang sama akan dilakukan oleh negara bersangkutan kepada kita," ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas bang, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

"Seyogyanya iya. Namanya prinsip resiprokal artinya subjeknya di situ timbal balik hukumnya," tambahnya.

Sebagai informasi, Indonesia telah memulangkan lima orang terpidana kasus narkoba Bali Nine yang tersisa ke Australia. Selain itu, Indonesia juga akan memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Ahmad juga menjawab apakah Indonesia akan meminta WNI yang ditangkap terkait penyelundupan senjata api (senpi) ilegal dari Filipina dipulangkan. Dia mengatakan hal itu mungkin saja dilakukan.

"Semuanya memungkinkan, termasuk tadi yang dikatakan mungkin ada penyelundupan yang ditangkap di Filipina. Kemungkinan bisa juga. Tergantung perkembangan zaman ke depan," ujarnya.

Dia mengatakan ada pengaturan taktis atau practical arrangement yang disepakati dalam pemulangan narapidana sehingga tetap berstatus sebagai narapidana. Ahmad mengatakan Indonesia tetap berkomitmen dalam pemberantasan narkoba.

"Di mana kita tidak mengubah status narapidana tersebut mereka tetap melanjutkan tidak ada beda hanya perpindahan tempat penjaranya ke negara masing-masing," ungkapnya. Ahmad mengatakan, permintaan pemindahan narapidana atau transfer of prisoners kasus Bali Nine ini sudah diupayakan sejak 2005, tetapi tak kunjung dikabulkan oleh pemerintah Indonesia.

"Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali. Kita sama berdiri tegak dan patut digarisbawahi bahwa transfer ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini murni adalah niat baik," kata Ahmad.



Direktur Pembinaan Narapidana Direktorat Jenderal Pemasarakatan RI Erwedi Supriyatno (kanan bawah) dan Perwakilan Australia, Minister-Counsellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia, Lauren Richardson (kiri bawah) disaksikan lima narapidana kasus Bali Nine menandatangani berkas serah terima pemindahan narapidana Bali Nine di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12/2024). (ist)

Sebelumnya, Mary Jane telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta jelang pemulangannya ke Filipina. Mary Jane pun menjalani pemeriksaan kesehatan hingga administrasi.

Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu, 18 Desember dini hari. Mary Jane akan bertolak menuju Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Sedangkan kelima napi Bali Nine telah ditransfer dari Bali dan telah mendarat di Darwin, Australia kemarin. Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Penjelasan soal Mary Jane dan Bali Nine

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menjelaskan terkait perbedaan proses pemindahan napi Bali Nine ke Australia dengan Mary Jane Veloso ke Filipina. Kemenko Kumham Imipas menegaskan tidak ada perlakuan khusus untuk pemindahan napi dalam 2 kasus tersebut.

"(Disebutkan) ada perbedaan antara pemindahan tahanan untuk Australia dan Filipina, itu sebenarnya bukan perlakuan yang berbeda, tapi hanya permintaan dari pemerintah Australia," ujar Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Ahmad

Usmarwi Kaffah kepada wartawan dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Ahmad menjelaskan, dalam proses itu, pemerintah Australia ingin negosiasi dengan pemerintah Indonesia berjalan baik. Sedangkan di saat yang sama, pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dalam penyusunan practical arrangement.

"Sehingga perhatian kami tersedot untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, proses harus tetap berlangsung, di mana napi dari Malang, dari Surabaya, dari Bangli, harus tepat waktu dia tiba di Bali, sehingga bisa bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi," tuturnya.

"Bahwa mereka perlu membuat semuanya berjalan dengan baik. Dan juga untuk memastikan bahwa negosiasi juga terus diperbarui dan semuanya aman," tambahnya.

Ahmad menambahkan bahwa dalam proses negosiasi Mary Jane tak melalui serangkaian proses yang panjang. Oleh karenanya, lanjut Kaffah, proses pemindahan itu dapat dilakukan secara terbuka.

"Dan untuk Mary Jane sebenarnya karena kita masih punya banyak waktu. Jadi semuanya terbuka. Jadi tidak ada masalah tentang segalanya," tuturnya. Adapun, kelima napi Bali Nine itu telah ditransfer dari Bali dan telah mendarat di Darwin, Australia. Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza

Beda Amnesti, Grasi, Abolisi, dan Remisi

Amnesti

Pengampunan hukuman yang diberikan Presiden kepada seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana tertentu, dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, dapat diberikan tanpa permohonan terlebih dahulu.

Grasi

Pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Abolisi

Penghapusan proses hukum yang sedang berjalan atau baru akan berlangsung diberikan kepada terpidana perorangan.

Remisi

Pengurangan hukuman yang diberikan kepada terpidana atau narapidana, berupa pengurangan masa pidana, tidak dapat diberikan kepada terpidana dengan hukuman seumur hidup.

Sumber UU Darurat No.11/1954, UU No 22/2002

Mahendra, menyebutkan kelima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Counsellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke. (din,rls,ist,ant/dya)

Resmi Dipecat PDIP: Kemana Jokowi, Gibran dan Bobby Berlabuh?

27 DAFTAR NAMA ANGGOTA PDI PERJUANGAN DIPECAT KAITAN PILPRES DAN PILKADA 2024

1. H. Lalu Budi Suryata

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah NTB

2. Putu Agus Suradnyana

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Bali

3. Putu Alit Yandinata

* Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Bali

4. Muhammad Alfian Mawardi

* Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain
* Asal daerah Kalimantan Tengah

5. Hugua

* Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Sulawesi Tenggara

6. Elisa Kambu

* Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Papua Barat Daya

7. John Wempi Wetipo

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Papua Tengah

8. Willem Wandik

* Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Papua Tengah

9. Suprpto

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Sorong/Papua Barat Daya

10. Gunawan HS

* Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Malang/Jawa Timur

11. Heriyus

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Murung Raya/ Kalimantan Tengah

12. Ery Suandi

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Karimun/ Kep. Riau

13. Fajarius Laia

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

14. Mada Marlince Rumaikewi

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Mamberamo Raya/ Papua

15. Feri Leasiwal

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah P. Morotai/ Maluku Utara

16. Lusiany Inggilina Damar

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
* Asal daerah Halmahera Barat/ Maluku Utara

17. Dorthea Goeha

* Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

18. Weski Omega Simanungkalit

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

19. Arimitara Halawa

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

20. Camelia Neneng Susanty Sinurat

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

21. Sihol Marudut Siregar

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

22. Hilarius Duha

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

23. Yustina Repi

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

24. Effendi Muara Sakti Simbolon

* Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
* Asal daerah DKI Jakarta

25. Joko Widodo

* Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat
* Asal daerah Solo/ Jawa Tengah

26. Gibran Rakabuming Raka

* Melanggar etik partai maju Calon Wakil Presiden 2024 dari Partai Lain
* Asal daerah Solo/ Jawa Tengah

27. Muhammad Bobby Afif Nasution

* Melanggar etik Partai maju Calon Gubernur Pilkada 2024 dari Partai Lain
* Asal daerah Kots Medan/ Sumatera Utara



Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun mengumumkan pemecatan Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Dok PDIP

JAKARTA-DPP PDIP resmi memecat Jokowi sebagai kader mereka. Selain Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution juga dipecat.

Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden merupakan putra sulung Jokowi. Sedangkan

Bobby merupakan menantu Jokowi yang menang di Pilgub Sumut 2024.

Beberapa partai pun buka suara terkait peluang menjadi pelabuhan baru keluarga Jokowi. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai pemecatan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo dari PDIP.

"Gini kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Yang saya tahu pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan, jadi saya pikir kita lihat perkembangannya, dari apa yang menjadi respons," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/12/2024).

Namun terkait peluang akan Jokowi untuk bergabung partai Golkar, Bahlil belum mau memastikan. Yang pasti menurut mantan Menteri Investasi ini, Golkar merupakan partai yang inklusif.

Begitu juga dengan peluang bergabungnya Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga dipecat oleh PDIP. Menurut Bahlil hal itu tergantung dari keputusan tiap individu.

"Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusifnya," katanya.

Lebih lanjut, ia belum mau memastikan bakal menemui Jokowi dalam waktu dekat. Yang jelas jika bertemu tentu bukan dalam kondisi pembahasan persoalan pemecatan dari PDIP.

"Andaikan kalaupun saya ketemu kan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain. Saya ketemu saja biasa," katanya.

Merespons mengenai Partai Gerindra yang membuka pintu bagi Jokowi bergabung, Bahlil mengatakan setiap partai pasti punya keinginan untuk mengajak tokoh.

"Ya kan setiap partai pasti punya keinginan untuk mengajak untuk mengajak tokoh potensial. Pak Jokowi kan mantan presiden, pasti punya apa ya, simpati yang banyak. Dukungan yang banyak. ya kita lihat lah," kata Bahlil.

Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya gak ingin berkomentar terlalu jauh kita jaga situasi politik kita mengakhir 2024 ini dengan baik, karena a2024 ini sangat monumental. Event politik secara nasional Pemilu, Pilpres, pemilihan anggota legislatif, dan baru saja kita lampau Pilkada terbesar sepanjang sejarah berjalan dengan baik," katanya di Kompleks Istana Kepresidenean, Senin (16/12/2024).

Namun saat ditanya apakah berminat untuk memboyong Jokowi ke Partai Demokrat, ia hanya tertawa. Ia juga mengatakan mengenai hal itu lebih baik ditanyakan langsung kepada Jokowi. "Lebih baik tanya langsung ke pak Jokowi," kata AHY.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Jokowi hanya formalitas. Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDI-P. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDI-P sudah wassalam dengan Jokowi dan Gibran," kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

Menurut Adi, pemecatan Jokowi dan Gibran tersebut juga tidak menurunkan daya tawar keduanya ketika nanti ingin bergabung dengan partai politik (parpol) lainnya.

Dia pun mengatakan, Jokowi dan Gibran sebenarnya bisa dengan mudah berpindah partai meskipun belum dipecat lantaran sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P.

"Tidak ada pengaruhnya terhadap daya tawar Jokowi dan Gibran setelah dipecat PDI-P. Toh partai lain juga tahu bahwa Jokowi-Gibran sudah tak lagi jadi bagian PDI-P," ujar Adi.

Selain itu, Adi menyebut, partai lain dengan mudah menerima Jokowi-Gibran bergabung. Sebab, Jokowi pernah menjadi Presiden RI dan memiliki pengikut loyal. Sementara itu, Gibran saat ini berstatus sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI hingga lima tahun ke depan..(wid, rls, ist, ant/dya)

Hujan Ekstrem, BPBD Jatim Catat 8 Wilayah Alami Banjir

SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD Jatim) mencatat ada delapan kabupaten di Jatim yang mengalami banjir dampak hujan deras sejak beberapa hari terakhir.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto menyebut, wilayah yang terkena banjir itu yakni Tuban, Ponorogo, Mojokerto, Trenggalek, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, dan Jombang.

"Yang paling baru adalah kejadian banjir di Ponorogo semalam yang bisa mengalami ketinggian dari 30 sampai 100 cm," ujarnya, Senin (16/12/2024).

Di Kabupaten Ponorogo, kata Gatot, banjir terjadi di wilayah yakni Kecamatan Sambit, Jetis, dan Ponorogo. Penyebabnya hujan deras yang mengguyur sejak malam sebelumnya, mengakibatkan jebolnya tanggul di beberapa titik. Kondisi itu memaksa sebagian warga mengungsi, dengan 50 orang di antaranya ditampung di pendopo setempat.

"Kalau titiknya memang ada beberapa yang jebol, sehingga perlu dilakukan detail peninjauan oleh teman-teman pengairan. Alhamdulillah, disana dapat atensi dari BNPB dan pak Kaban juga akan kesana," terangnya.

Sementara banjir di Trenggalek, banjir terjadi di Kecamatan Karangan akibat meluapnya Sungai Jajar dan Sungai Karangan. Meski tidak ada tanggul yang jebol, luapan air dari kedua sungai tersebut menyebabkan banjir dengan ketinggian air antara 20 hingga 60 cm. Namun, Gatot memastikan tidak ada warga yang mengungsi di Trenggalek, karena air mulai berangsur surut.

Selanjutnya di wilayah Pasuruan, banjir terpantau melanda sejumlah daerah dengan ketinggian air mencapai 100 cm. Banjir di wilayah ini sudah berlangsung hampir dua minggu, dan semakin parah setelah hujan deras yang terjadi semalam.

Sementara itu, penanganan di wilayah lain seperti Sidoarjo, Gresik, Tuban, Jombang dan Mojokerto juga terus dilakukan dengan menyiagakan pompa air dan alat berat untuk mempercepat penurunan genangan air di beberapa titik.

"Kalau yang di wilayah Sidoarjo memang itu wilayah rendah kan, kaitannya di Tulangan, dekat Porong, itu kan sering terjadi banjir karena dipengaruhi tinggi muka air," ucapnya.

Gatot mengungkapkan, penanganan darurat di berbagai wilayah terus dilakukan oleh BPBD Jatim, bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk TNI-Polri, dan tim relawan.



Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita di lokasi bencana banjir di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Senin (16/12/2024). (Dok. Humas Jatim)

Untuk wilayah Ponorogo, Pemprov Jatim bersama dengan BNPB juga telah mengirimkan alat berat dan bantuan logistik sejak semalam. Selain itu, Pj Gubernur Jatim juga turun langsung meninjau lokasi banjir di Ponorogo serta memantau kondisi tanggul yang jebol.

Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir juga diimbau meningkatkan kewaspadaan, mengingat intensitas hujan diprediksi masih tinggi hingga awal Januari 2025.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir. Pastikan barang-barang berharga disimpan di tempat aman dan segera mengungsi jika air mulai naik. Jika beraktivitas di luar, pastikan untuk memilih tempat berlindung yang aman dari risiko pohon tumbang atau bangunan yang bisa runtuh," pesan Gatot.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga 2 Januari, yang berpotensi menambah volume air di sungai-sungai dan memperparah banjir di beberapa daerah.

"Kami mohon agar masyarakat berhati-hati dalam beraktivitas. Mungkin dia beraktivitas di luar, mereka kan harus gunakan mantel dan alat pelindung diri. Kalau sebenarnya menggunakan sepeda motor, kalau seandainya mereka berlindung di tempat-tempat tertentu pada saat musim hujan, mohon untuk memperhatikan lingkungan tempat dia berlindung," tandasnya.

1.138 Ha Sawah Terdampak

Lahan persawahan seluas 1.138,61 hektare di Jawa Timur, terdampak banjir sejak 1-13 Desember 2024. Hal itu membuat petani gagal panen atau puso di lahan seluas 46,40 hektare.

"Banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi dan luapan air

dari sungai," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Heru Suseno, Senin (16/12/2024).

Sementara itu rincian lahan persawahan di sejumlah daerah yang terdampak banjir antara lain adalah Kabupaten Jombang dengan luas 838 hektare, Sidoarjo tercatat 96 hektare dan gagal panen 6 hektare.

Kemudian Kabupaten Mojokerto terkena 60,51 hektare dan puso 1 hektare, Kota Mojokerto terkena 41,90 hektare dan puso 40,40 hektare, dan Ngawi terdampak 22 hektare.

Sedangkan secara kumulatif lahan pertanian yang dilanda banjir sepanjang 2024 mencapai 1.5842,02 hektare dengan puso 1.331,65 hektare.

Heru menyebut puso terparah akibat banjir terjadi di Kabupaten Lamongan dengan luas 978,80 hektare dan puso 398,30 hektare.

Ia melanjutkan petani yang mengalami gagal panen bakal mendapat ganti rugi sesuai dengan Asuransi Usaha Tani Pangan (AUTP). Pihaknya telah menganggarkan Rp500 juta.

"Ganti rugi tersebut untuk yang lahannya mengalami kerusakan 70 persen karena terendam banjir sehingga tidak bisa panen," ujarnya.

Dengan dana tersebut, setiap petani akan mendapatkan bantuan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare lahan yang rusak.

"Jadi ketika petani mengalami gagal panen bisa langsung diklaimkan untuk mendapatkan ganti rugi," pungkasnya. (ssn, cnn, ist/dya)

Tinjau Banjir Ponorogo, Pj Gubernur Jatim Fokus Evakuasi dan Perbaikan Tanggul Jebol

PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meninjau langsung lokasi bencana banjir di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Senin (16/12/2024).

Dalam tinjauannya, Pj Gubernur Adhy didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita serta jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim. Mereka bersama-sama menyusuri wilayah banjir untuk melihat kondisi warga yang terdampak.

"Kita turun langsung mengecek bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan

pengungsian, kita juga ingin mengecek para korban yang terdampak dan kita pastikan seluruh proses evakuasi cepat dilakukan," ujar Adhy di tengah proses evakuasi warga terdampak banjir.

Proses evakuasi warga terdampak ini, kata Adhy, merupakan bentuk respons cepat dari Pemprov Jatim. Ia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran PD Pemprov Jatim yang bertanggung jawab atas kebencanaan, bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang tidak terpenuhi kebutuhan makanannya.

Selain itu, lanjut Adhy, proses pendistribusian bantuan juga disebutnya tidak kalah penting. Hal

ini mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mau ke pengungsian walaupun sudah disiapkan di Pendopo Kabupaten Ponorogo.

Terkait penanganan sumber masalah banjir, Adhy telah menginstruksikan Dinas PU Sumber Daya Air Jatim untuk bergerak cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Namun sayangnya, masih terkendala debit air dan curah hujan yang masih tinggi.

"Kami sudah siapkan dengan Dinas PU SDA untuk bisa menutup tanggul, tetapi hari ini belum bisa karena airnya masih tinggi. Mudah-mudahan sore ini surut batas tanggulnya terlihat, baru kita perbaikan," terangnya. (ufi, rls/dya)

Rekapitulasi Suara Pilkada 2 Provinsi Belum Tuntas hingga Hari Terakhir

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat ada dua provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi suara Pilkada 2024. KPU akan menerbitkan surat perintah terkait perpanjangan masa rekapitulasi, jika rekapitulasi tersebut tidak selesai hari ini.

"Berkaitan dengan situasi rekapitulasi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, saat ini tengah tahapan penyelesaian," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Idham berharap KPU Papua Tengah dan Papua Pegunungan bisa menyelesaikan rekapitulasi suara Senin ini. Berdasarkan jadwal, 16 Desember merupakan batas akhir rekapitulasi dan pengumuman hasil Pilkada.

Idham mengatakan KPU akan menerbitkan surat perintah jika rekapitulasi tidak dapat selesai Senin malam. Idham mengatakan surat perintah itu akan menjadi dasar KPU Papua Tengah dan Papua Pegunungan

menuntaskan rekapitulasi.

"Hari ini adalah batas akhir penyelesaian rekapitulasi, KPU RI menekankan bahwa tahapan rekapitulasi harus selesai, harus dipastikan selesai, dan nanti kami akan terbitkan kebijakan untuk sebagai pegangan jika memang pada malam hari ini belum selesai, maka esok hari dapat dilanjutkan kembali," ujarnya.

Idham mengatakan ada tiga kabupaten yang juga belum selesai melakukan rekapitulasi. Ketiga kabupaten itu ialah Kabupaten Tolikara di Papua Pegunungan, serta Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai di Papua Tengah.

"Di Tolikara tinggal enam distrik yang terrekapitulasi, di Paniai ini sedang penyelesaian rekapitulasi, di Puncak Jaya juga sama," jelasnya.

Idham mengatakan rekapitulasi di daerah-daerah tersebut ditangani serius oleh KPU Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dia mengatakan pihaknya juga terus melakukan monitoring pelaksanaan rekapitulasi

di dua provinsi tersebut.

"Jadi setiap saat kami monitoring lewat kontak, memastikan bahwa tahapan berjalan tidak ada gangguan lagi dan kemarin kami sudah minta agar kepada KPU provinsi, di dua provinsi tersebut memberikan arahan agar melakukan koordinasi dengan kepolisian, koordinasi dengan pasangan calon, dengan Bawaslu, dengan pemantau," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin mengaku berempati dengan kondisi beberapa daerah di Papua pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dia mengatakan, telah menerima pesan whatsapp dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang mempertanyakan apakah pilkada masih diperlukan di Papua jika kondisi terus memburuk dan menyebabkan konflik.



Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik

"Pagi tadi saya di-WA oleh Menteri Dalam Negeri menanggapi, 'kalau begini situasinya kita harus pikirkan apakah masih perlu Pilkada di Papua'," kata Afif dalam rakor bersama KPUD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (12/12/2024) malam. (din, wid, ant/dya)

DKPP: KPU RI Lakukan Pembangkangan Hukum di Pileg 2024



Sidang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (16/12/2024).ist

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan 6 anggota KPU lainnya. DKPP mengatakan KPU tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti putusan Bawaslu hingga terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di dapil Gorontalo 6.

Terkait keputusan itu, anggota Majelis Hakim DKPP Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, KPU RI telah melakukan pembangkangan terhadap hukum. "Tindakan teradu merupakan tindakan pembangkangan terhadap hukum dan etika telah menimbulkan dampak yang luas dan merugikan upaya-upaya yang telah dilakukan

untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam politik," tutur dia.

Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Gedung DKPP, Senin (16/12/2024). Putusan nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 diadukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP).

"Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengaduan untuk sebagian," kata Heddy.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap teradu III Mochammad Afifuddin selaku Ketua KPU merangkap anggota, teradu II Idham Holik, teradu IV Yulianto Sudrajat, teradu V Betty Epsilon Idroos, teradu VI Parsadaan Harahap, dan teradu VII August Mellaz," imbuhnya.

Selain ke Afifudin, DKPP juga menjatuhkan peringatan keras ke 6 anggota KPU lainnya yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.

Heddy memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Dia juga memerintahkan Bawaslu untuk

mengawasi.

"Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan, memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini," untkapnya.

Dalam pertimbangannya, anggota DKPP Ratna Dewi mengatakan KPU terbukti tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pemenuhan 30% keterwakilan perempuan. Akibat tidak sungguh-sungguh KPU, kata Ratna, dapil Gorontalo 6 harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Para teradu terbukti tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu a quo dengan sungguh-sungguh terhadap pemenuhan keterwakilan 30% keterwakilan perempuan yang berakibat pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil 6 Provinsi Gorontalo," kata Ratna.

Ratna mengatakan KPU seharusnya memahami bahwa putusan Bawaslu terkait mengubah aturan tata prosedur juga harus dilaksanakan dalam bentuk PKPU. Ratna mengatakan ketua dan anggota KPU telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan baru untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan.

"Teradu II sampai teradu VII semestinya memahami kewajiban hukum untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017," ujarnya.

"Tindakan teradu II dan VII telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan baru untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan, hal ini buktikan dengan putusan Bawaslu nomor 101 dan seterusnya," imbuhnya.

Sebelumnya, KMPKP mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI ke DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik. KMPKP menilai KPU RI tak berkomitmen melaksanakan putusan MA soal keterwakilan perempuan sehingga menyebabkan MK memutuskan pemilihan suara ulang (PSU) di dapil Gorontalo 6.

Perwakilan KMPKP, Mike Verawati mengatakan, KPU RI tidak berkomitmen merevisi Peraturan KPU No 10 tahun 2023 terkait Keterwakilan Perempuan yang sebelumnya sudah diputus MA melanggar hukum. Dia mengatakan tidak seriusnya KPU RI dalam melaksanakan putusan MA tersebut berujung pada PSU di dapil Gorontalo 6.

"Kami melaporkan KPU yang tidak segera berkomitmen untuk mengubah peraturan terkait pemenuhan 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan case terakhir yang juga sebenarnya MK juga sudah memutuskan pemilihan ulang di Gorontalo akibat laporan yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Maka ada proses PSU yang diberikan oleh MK," kata Mike, di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024). (rls, din, ist/dya)

Kota Malang Perketat Pengawasan Komplotan Dropping Pengemis

MALANG - Satpol PP Kota Malang menemukan modus baru dropping pengemis dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kota Malang. Modus ini terungkap saat tim patroli mendapati 2 truk mencurigakan yang diduga membawa sejumlah pengemis di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen.

Untuk mencegah kejadian serupa, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heri Mulyono mengatakan, pengawasan di pintu masuk kota kini akan diperketat.

"Setiap malam, sebelum off jam 23.00 WIB itu saya minta tim kami berkeliling. Kemarin ditemukan dropping dari luar kota. Droppingnya tengah malam. Itu kami temukan di sekitar Jalan Semeru, dekat stadion Gajayana. Diketahui asalnya dari Pasuruan, bahkan ada 2 truk," ujar Heru, Senin (16/12/2024).

Mengetahui temuan modus tersebut, Heru menyampaikan, "Saat itu juga truknya saya suruh kembali, karena waktu itu sempat kami kejar. Kalau gak mau, kita laporkan ke polisi

akhirnya mereka balik."

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk mengantisipasi kejadian serupa, Heru menuturkan, mulai malam ini pihaknya akan melakukan pemantauan di beberapa pintu masuk kota Malang.

"Jadi kalau ada truk masuk yang ciri-cirinya itu tertutup atasnya, tapi kelihatan dari luar gak ada muatannya, bisa disinyalir itu memuat manusia. Kita wajib curiga, kita buntuti itu," tuturnya.

Heru juga mengungkapkan, mayoritas pengemis yang telah diamankan bukan berasal dari Kota Malang. Berdasarkan data Satpol PP, menurutnya lebih dari 70 persen di antaranya berasal dari luar kota.

Menurutnya, jika anak jalanan, gelandangan dan pengemis (anjalgepeng) memang merupakan warga Kota Malang, maka Satpol PP akan melakukan pembinaan. "Kalau dari luar kota, setelah kami amankan maksimal 3 hari, harus kami serahkan kembali ke Dinsos masing-masing



Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kantor Satpol PP Kota Malang. (dok. Satpol PP Kota Malang)

sesuai asalnya," kata Heru.

Namun, proses ini tidak selalu berhasil mengatasi masalah. Heru menyebutkan, banyak anjal-gepeng yang kembali ke Kota Malang setelah diserahkan ke dinas sosial di daerah asalnya.

"Kenapa Kota Malang jadi jujugan favorit? Karena jiwa sosial masyarakat di sini tinggi. Kemudian banyak pendatang yang merasa kasihan dan

memberi uang kepada pengemis," tuturnya.

Heru menekan-nakan, sikap empati masyarakat ini, meskipun baik, dapat menjadi bumerang. Menurutnya, jika terus dibiarkan, anjal dan gepeng akan terus berdatangan ke Kota Malang, merusak wajah kota, dan memunculkan potensi kerawanan seperti pemaksaan atau bahkan kejahatan. (Santi/Dya)

Wacana Proyek Skytrain dan Terminal Bus Wisata Anggaran Daerah Terbatas, Pemkab Malang Andalkan Pendanaan Swasta



Ilustrasi: Skytrain di Indonesia. (dok. Angkasa Pura II)

MALANG - Menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana menggandeng sektor swasta untuk merealisasikan proyek skytrain dan terminal bus wisata. Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembahasan lebih lanjut terkait dua proyek infrastruktur ini dijadwalkan akan dilakukan pada 2025 mendatang.

"Kalau dari APBD sendiri, jujur ini cukup berat. Jadi itu kami upayakan melalui skema KPBU. Karena proyek ini juga akan melintasi tiga daerah di Malang Raya," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Senin (16/12/2024).

Tomie menjelaskan, pihaknya telah melakukan diskusi awal dengan pemerintah pusat terkait proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan skytrain diharapkan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan konektivitas yang lebih baik di Malang Raya, yakni Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu.

"Ya, sejalan dengan konsep pengembangan daerah megapolitan.

Dari sisi perencanaan, kami sudah memasukkan pembangunan skytrain sebagai bagian dari langkah menuju Malang Raya yang megapolitan," jelas Tomie.

Konsep megapolitan Malang Raya, disebut Tomie membutuhkan konektivitas yang solid antarwilayah. Menurutnya, skytrain dan terminal bus pariwisata merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mobilitas antar daerah, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan mengurai kemacetan di wilayah perbatasan.

"Namanya megapolitan, salah satu kunci utamanya adalah keterhubungan atau konektivitas. Nah upaya kami untuk mewujudkan itu (skytrain dan terminal bus wisata)," ungkapnya.

Namun, Tomie menekankan 2 proyek tersebut saat ini masih dalam tahap analisis dan pengkajian lebih lanjut. Beberapa aspek, seperti jalur lintasan hingga titik awal dan akhir skytrain, diakuinya masih membutuhkan diskusi intensif dengan pemerintah daerah lain di Malang Raya.

"Kami harus memastikan semua pihak sepakat. Lokasi berangkat atau turunnya penumpang di mana, itu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah," katanya.

Tomie menyebut, pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat

dan dua pimpinan daerah lainnya akan dilakukan pada tahun 2025. "Ya, harapannya di tahun 2025, kami akan mulai membahas kembali rencana ini secara detail. Untuk pelaksanaannya, belum bisa dipastikan," terangnya.

Sebelumnya, Bupati Malang, Sanusi, telah menyampaikan rencana menggandeng kepala daerah di Kota Malang dan Kota Batu untuk mempercepat realisasi proyek ini. Sanusi menilai, kolaborasi antarwilayah merupakan kunci untuk mengatasi tantangan teknis dan pendanaan, sekaligus memaksimalkan manfaat infrastruktur bagi seluruh Malang Raya.

Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait proyek skytrain ini. Ia mengungkapkan, saat ini sebagai Pj Wali Kota Malang, dirinya tengah fokus pada 11 program prioritas yang menjadi amanat selama masa jabatannya.

"Terkait wacana proyek skytrain, jujur saya belum bisa banyak berkomentar karena belum ada info resmi. Saya saat ini masih konsen ke 11 prioritas, yang mana itu memang amanat untuk saya selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang," tutur Iwan. (Santi/Dya)

Siti Fauziah Cetak Sejarah

Perempuan Pertama Menjabat Sekjen MPR RI

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani melantik Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR yang baru pada Senin (9/12/2024) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pelantikan Siti menjadi sejarah baru lantaran ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan bergengsi itu sepanjang sejarah, yang sebelumnya posisi ini selalu diisi oleh laki-laki.

"Ini adalah catatan dalam sejarah, Sekretaris Jenderal MPR pertama seorang perempuan," ujar Muzani dalam pidatonya usai melantik Siti Fauziah seperti dikutip dari Antara.

Muzani berharap Siti yang baru saja dilantik sebagai Sekjen MPR RI dapat mengawal konstitusi, mengamalkan ideologi negara, dan menjalankan fungsinya serta melayani anggota dengan baik kedepannya.

Sementara itu, sebelumnya Siti Fauziah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI sejak September 2023 lalu.

Siti akan fokus pada isu kemasyarakatan dan UMKM

Antara melansir, Siti akan mengimplementasikan kegiatan para pimpinan MPR RI periode 2024-2029 yang lebih berfokus pada isu kemasyarakatan dan isu UMKM. Hal ini disampaikan usai menjalani prosesi pelantikan sebagai Sekjen MPR RI yang baru.

"Itu hal-hal yang diharapkan oleh pimpinan MPR pada periode ini untuk lebih ke masyarakat, lebih dekat ke masyarakat dan memajukan UMKM," ujar Siti.

Perempuan 59 tahun itu juga menyebut bahwa programnya akan mengedepankan nilai-nilai gotong royong, termasuk kegiatan Lomba Debat Konstitusi MPR RI. Siti juga mengungkap upayanya untuk mengadakan kegiatan ke industri strategis dan perbatasan Indonesia.

Sebagai Sekjen, Siti juga memiliki tugas utama untuk mendukung kinerja MPR dan menyukseskan berbagai programnya termasuk di bidang

pendidikan dan politik. Siti pun berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi MPR dengan lembaga negara lainnya untuk memperkuat sinergi dalam mengamalkan ideologi negara.

Sosok Siti Fauziah

Siti Fauziah lahir di Bandung pada 29 November 1965. Ia mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Pancasila dan magister di Universitas Kejuangan dengan mengambil jurusan yang sama, yaitu manajemen.

Siti sudah berkarier di bidang pemerintahan sejak dua dekade lalu dengan menjabat berbagai posisi strategis. Ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Puldata sejak tahun 1955 hingga menduduki posisi Pembina Utama.

Siti juga sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan Paripurna dan Sekretariat Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja, Biro Majelis pada 2002. Tak hanya itu, Siti juga dipercaya menjabat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI pada 2020-2022. Ia kemudian melanjutkan kariernya sebagai Plt. Deputy Bidang Administrasi pada 2022 dan Plt. Sekjen MPR sebelum akhirnya resmi dilantik sebagai Sekjen.

Berbagai pengalaman Siti di bidang administrasi dan kepemimpinan telah memberikan kontribusi besar dalam kinerja lembaga tinggi negara seperti MPR. Pelantikan Siti sebagai Sekjen MPR juga dianggap sebagai peluang pemberdayaan perempuan di sektor pemerintahan yang semakin luas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Jenderal MPR RI

Sebagai Sekretaris Jenderal MPR

RI, Siti Fauziah memiliki tugas utama untuk mendukung kinerja MPR dalam menjaga konstitusi dan mengamalkan ideologi negara. Posisi ini tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga melibatkan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.

Selain itu, Sekjen juga bertanggung jawab memastikan keberlangsungan berbagai program MPR, termasuk program pendidikan politik untuk masyarakat. Peran strategis ini membutuhkan kemampuan manajerial yang baik untuk menjaga efisiensi dan transparansi dalam operasional MPR.

Dengan pengalaman panjangnya di bidang administrasi negara, Siti Fauziah diharapkan mampu membawa pembaruan yang mendukung visi dan misi MPR RI. Ini mencakup penerapan sistem kerja yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dampak Pelantikan

Siti Fauziah Terhadap MPR RI

Pelantikan Siti Fauziah mencerminkan komitmen MPR dalam mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja. Sebagai Sekjen perempuan pertama, ia menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam sektor publik.

Langkah ini juga memperkuat citra MPR RI sebagai lembaga yang inklusif dan progresif. Dengan adanya perwakilan perempuan di posisi strategis, MPR diharapkan mampu lebih memahami dan merespons isu-isu gender dalam kebijakan nasional.

Selain itu, kehadiran Siti Fauziah memberikan harapan baru terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan program kerja MPR, yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien di masa mendatang. (nei,ist/dya)

“Itu hal-hal yang diharapkan oleh pimpinan MPR pada periode ini untuk lebih ke masyarakat, lebih dekat ke masyarakat dan memajukan UMKM,”



Gaya Hidup Sehat Dimulai dari Rumah



Tubuh yang sehat dengan kekebalan yang kuat ternyata bisa dicapai mulai dari rumah. Olahraga sebenarnya nggak perlu yang mahal seperti gym atau pilates. Banyak sekali aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah.

Apalagi untuk kamu yang sehari-harinya sibuk bekerja, kegiatan ini bisa kamu jadikan alternatif untuk dilakukan weekend dan nggak kalah efektif untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan tubuh kita.

Olahraga di rumah merujuk pada aktivitas fisik yang dilakukan dalam lingkungan domestik tanpa perlu mengunjungi fasilitas kebugaran khusus. Konsep ini telah mengalami lonjakan popularitas, terutama sejak pandemi global membatasi akses ke gym dan pusat kebugaran. Esensinya terletak pada fleksibilitas dan aksesibilitas, memungkinkan individu untuk menjaga kebugaran mereka tanpa terkendala oleh batasan waktu atau lokasi.

Berbeda dengan olahraga konvensional yang sering memerlukan peralatan khusus atau ruang yang luas, olahraga di rumah dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang dan sumber daya yang tersedia. Ini bisa mencakup berbagai aktivitas, mulai dari yoga dan pilates hingga latihan kekuatan menggunakan berat badan sendiri atau peralatan sederhana yang mudah ditemukan di rumah.

Keunikan olahraga di rumah terletak pada kemampuannya untuk diintegrasikan ke dalam rutinitas

harian dengan mudah. Misalnya, seseorang bisa melakukan stretching saat menonton televisi, atau melakukan push-up di sela-sela pekerjaan rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga menghilangkan hambatan psikologis yang sering dikaitkan dengan pergi ke gym, seperti rasa malu atau intimidasi.

Lebih dari sekadar aktivitas fisik, olahraga di rumah juga mencakup aspek mental dan emosional. Ini bisa menjadi sarana meditasi aktif, membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Dengan menghilangkan faktor eksternal seperti perjalanan ke gym atau interaksi sosial yang tidak diinginkan, olahraga di rumah memungkinkan fokus yang lebih besar pada diri sendiri dan tujuan kebugaran personal.

Tidak hanya olah raga, untuk menjaga kesehatan Kamu juga harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi. Jangan sembarangan makan ya, Happy Health. Pertanyaannya, harus makan makanan yang seperti apa sih? Ada beberapa point penting untuk mengetahui makanan seperti apa yang harus dimakan, yakni:

1. Pilih Jenis Makanan dan Porsi Sehat untuk Disantap

Makan bukan berarti asal kenyang begitu saja, namun Anda perlu memperhatikan kandungan gizi dan

nutrisi dalam setiap santapan. Piring sajian sebaiknya memenuhi makanan dengan asupan karbohidrat, makanan berprotein tinggi, mengandung vitamin, dan mineral seimbang. Maka itu, pastikan terdapat kombinasi aneka ragam makanan dalam satu piring. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun jenis makanan yang mampu mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

2. Perbanyak Konsumsi Sayur dan Buah

Dalam satu porsi sajian menu harian Anda, pastikan separuh piring terdapat bagian untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah adalah salah satu makanan yang memiliki serat tinggi, kandungan vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

3. Jadwalkan Aktivitas Fisik atau Olahraga Secara Teratur

Jika Anda makan berlebihan terutama kelebihan kalori, Anda disarankan untuk membakar kalori dengan menjadwalkan olahraga seperti jogging, jalan kaki, bersepeda, berenang, dan yoga. Namun, jangan langsung olahraga begitu selesai makan. Beri jarak minimal satu hingga dua jam karena tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan.

4. Perhatikan Jumlah Kalori yang Dimakan

Selain kalori, Anda juga didorong

untuk lebih memperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak dalam menu makanan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan batasan konsumsi gula, garam, dan lemak bagi tiap orang per hari, antara lain:

Gula tidak lebih dari 50 gram (4 sendok makan).

Garam tidak melebihi 2.000 miligram natrium/sodium atau 5 gram (1 sendok teh).

Lemak hanya 67 gram (5 sendok makan minyak).

Untuk kemudahan mengingat, rumusnya adalah G4 G1 L5. Jangan lupa juga untuk selalu membaca label kemasan makanan agar mendapatkan informasi nilai kandungan gizi sehingga Anda mengetahui dan memantau asupan gizi yang dikonsumsi.

5. Hindari Perut Kosong Sebelum Beraktivitas

Banyak dari kita yang gemar melewatkan waktu sarapan. Berbagai hal menjadi alasan, mulai dari tak punya waktu, tidak terbiasa, atau karena sedang menurunkan berat badan. Padahal melewatkan waktu makan di pagi hari ini bisa merugikan kesehatan karena tubuh memerlukan energi untuk beraktivitas. Kebiasaan makan berlebihan akibat perut kosong juga berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan rasa tidak nyaman seperti perut kembung, mual, hingga berisiko terkena penyakit. (nei,ist/dya)



Asteroid Bernilai USD10 Kuintiliun Bisa Ubah Dunia

NASA telah mengirim roket untuk menyelidiki asteroid senilai USD10 kuintiliun, yang secara hipotetis dapat mengubah setiap orang di Planet Bumi menjadi miliarder. Roket tersebut disebut telah dikirim lebih dari setahun lalu dan karyawan NASA mengatakan sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana.

Asteroid itu disebut Psyche dan ditemukan di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter.

Dilansir Indy100, asteroid itu memiliki begitu banyak elemen dan mineral langka sehingga jika dipanen dan dinilai di Bumi dengan nilai saat ini, nilainya akan menjadi USD10 kuintiliun, yang merupakan kelipatan beratus kali lipat dari nilai ekonomi dunia.

Ditemukan oleh astronom Italia Annibale de Gasparis pada 17 Maret 1852, yang menamakannya berdasarkan nama dewi jiwa Yunani yang lahir sebagai manusia dan menikah dengan dewa cinta Eros (Cupid dalam nama Romawi).

Asteroid ini terkadang disebut sebagai 16 Psyche karena merupakan asteroid keenam belas yang ditemukan.

Alasan di balik nilainya yang sungguh tak terduga adalah karena diyakini bahwa asteroid ini terdiri dari unsur-unsur termasuk platinum dan paladium, yang penting untuk mobil dan elektronik di Bumi.

Komposisi asteroid berbentuk kentang yang tidak beraturan ini, yang memiliki luas permukaan 64.000 mil persegi (165.800 kilometer persegi) kemungkinan besar terdiri dari 30 hingga 60 persen logam, menurut NASA.

Para ahli di badan tersebut meyakini bahwa itu sebenarnya adalah inti nikel-besi yang terekspos dari



sebuah planet purba (juga dikenal sebagai planetesimal) - salah satu blok penyusun tata surya kita.

NASA berhasil meluncurkan roket untuk menuju ke sana pada 13 Oktober 2023 dan lebih dari setahun kemudian, sejumlah karyawan NASA yang mengerjakan proyek tersebut mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai harapan.

"Dalam hati saya, yang benar-benar saya inginkan adalah misi kami yang membangkitkan semangat banyak orang untuk melihat hal yang tidak diketahui," kata Lindy Elkins-Tanton, kepala peneliti Psyche Mission di NASA.

"Ya ampun, tunggu saja sampai kita sampai di sana."Roket tersebut dijadwalkan terbang melewati Mars pada Mei 2026 dan mencapai asteroid tersebut pada 2029.

Apa Itu 16 Psyche?

Mengutip unilad.com, 16 Psyche adalah salah satu asteroid terbesar di

sabuk asteroid utama dengan luas permukaan sekitar 64.000 mil persegi (165.800 km persegi). Berbeda dari kebanyakan asteroid yang umumnya terdiri dari batuan dan es, 16 Psyche mengandung logam yang sangat berharga, seperti:

- Platinum

- Palladium

- Nikel

- Besi

Logam-logam ini memiliki peran penting dalam teknologi modern, terutama dalam industri otomotif dan elektronik.

NASA memperkirakan bahwa asteroid ini mungkin merupakan inti dari sebuah planet primitif (planetesimal) yang gagal terbentuk sempurna. Jika benar, asteroid ini

menawarkan wawasan berharga tentang sejarah pembentukan tata surya.

Misi NASA ke 16 Psyche

Pesawat ruang angkasa yang diluncurkan NASA akan menempuh perjalanan sejauh 2,2 miliar mil (3,5 miliar km) untuk mencapai asteroid ini pada Juli 2029. Misi utamanya bukan untuk menambang, tetapi untuk mempelajari:

1. Komposisi logam asteroid dan bagaimana logam tersebut terbentuk.
2. Proses pembentukan planet di awal tata surya.
3. Potensi 16 Psyche sebagai cerminan inti planet yang terekspos.

Apa yang Terjadi Jika Logam 16 Psyche Dibagi ke Semua Orang di Bumi?

Jika nilai asteroid sebesar US\$10 triliun dibagi rata kepada 8,025 miliar orang (perkiraan populasi global 2023), setiap orang akan mendapatkan sekitar US\$1,25 miliar.

Namun, ada beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan:

- Ekonomi Global Akan Kolaps

Kekayaan masif ini akan menghilangkan nilai mata uang dan menghancurkan sistem ekonomi modern.

- Ketimpangan Kekayaan Tetap Ada

Bahkan jika semua orang menjadi miliarder, kekayaan individu seperti Elon Musk (US\$313,9 miliar) akan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan distribusi tersebut. (nei,ist/dya)



Trik Fashion Modis Menutupi Perut Buncit

Banyak orang merasa kurang percaya diri dengan bentuk tubuh, terutama saat memiliki perut buncit. Perut buncit adalah masalah penimbunan lemak yang kerap dialami banyak orang. Kondisi ini tak hanya buruk bagi kesehatan, tapi juga memengaruhi kepercayaan diri karena membuat bentuk tubuh jadi kurang ideal.

Mayo Clinic memaparkan bahwa lemak di perut menumpuk karena kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Seiring bertambahnya usia, perempuan juga cenderung jadi lebih buncit karena hormon estrogennya menurun, sehingga lokasi penimbunan lemak bermuara di perut.

Itulah mengapa sering ditemukan perempuan dewasa dengan masalah perut buncit. Tapi tak perlu insecure, Ladies. Kamu bisa meniasasi masalah ini dengan memilih model baju untuk menutupi perut buncit. Yuk, simak rekomendasinya di bawah ini.

Model Baju untuk Menutupi Perut Buncit

Dalam kanal YouTube Alkhansas, dibagikan sejumlah tips memilih model baju yang tepat untuk menutupi perut buncit. Apa saja?

1. Fit & Flare

Pakaian fit & flare merujuk pada model baju yang agak ketat di bagian atas, sedangkan bagian bawahnya lebih longgar. Batas antara ketat dan longgar pada baju ini terletak di waistline atau lingkaran pinggang.

Dengan memilih bagian bawah yang lebih lebar, perut buncit akan tersamarkan. Model ini juga menciptakan siluet tubuh tetap ramping karena bagian dadanya ketat atau pas di badan.

2. Hem Lines

Bagian bawah atau ujung potongan baju disebut hem. Jadi, yang dimaksud dengan model hem lines adalah garis baju dengan bentuk asimetris atau tidak rata.

Secara umum, ada tiga jenis hem lines. Pertama, draped hem, yakni ujung baju yang bentuknya seperti segitiga. Ada pula cross hem, ujung bajunya memiliki model yang saling bersilangan sesuai namanya.

Terakhir, ada asymmetry hem, bagian ujung bajunya biasanya lebih pendek di bagian depan, tapi panjang di bagian samping. Seluruh aksesoris khusus pada bagian hem ini akan mengalihkan perhatian orang-orang dari perut buncitmu.

Tips lainnya yang harus kamu catat adalah jangan memilih baju hem lines yang ketat. Pastikan potongannya agak longgar, tapi tidak terlalu besar.

3. Shift Dress

Shift dress adalah gaun yang potongannya lurus dari atas hingga bawah. Namun, di bagian dadanya biasanya terdapat kupnat, sebuah lipatan kecil yang memberikan bentuk pada pakaian.

Karena potongannya tidak ketat di badan, perut buncitmu tak akan kelihatan. Selain itu, dress ini tak akan terlihat monoton karena terdapat detail kupnat di bagian depan.

4. Outer

Outer atau lapisan luar pakaian yang direkomendasikan kepada pemilik perut buncit terdiri dari tiga jenis, yakni cardigan, oversized outer, dan vest.

Cardigan biasanya terbuat dari bahan rajut dan bagian depannya terbuka meskipun memiliki kancing. Model ini sangat kasual dan timeless, sehingga cocok untuk dikoleksi.

Oversized outer merujuk pada outer yang ukurannya lebih besar dan panjang hingga paha. Biasanya, outer ini memiliki tali pengait di bagian tengah untuk menutupi perut buncit.

Sedangkan vest adalah outer tanpa lengan yang lebih mirip seperti rompi. Jenis outer yang satu ini dapat membuat penampilanmu jadi lebih formal dan rapi.

5. Empire dress

Empire dress cocok dipakai untuk kamu yang memiliki perut buncit karena tidak menampilkan perut kamu yang tertekan saat mengenakan gaun model ini.

Dress ini juga merupakan pilihan yang bagus untuk cuaca hangat karena membuat kamu tetap terkena angin karena modelnya yang terbuka.

Jika kamu merasa gaya berpakaian ini

membuat badan kamu terlihat pendek, kamu bisa coba menambahkan sepasang sepatu hak tinggi. Ini akan membuat kamu terlihat lebih tinggi dan proporsi gaun jadi lebih pas.

Carilah gaun yang tidak memiliki jahitan pada pinggang sehingga perut buncit dapat tersamarkan. Namun apabila gaun tersebut memiliki jahitan pada pinggang, pastikan gaun tersebut elastis sehingga lebih nyaman dan mudah untuk kamu gunakan.

6. T-shirt dress

Gaun t-shirt adalah pilihan gaun kasual yang mudah dan bisa menyamarkan perut buncit. Pastikan saja t-shirt-nya tidak terlalu ketat. Terkadang, model t-shirt dress ini memang dipotong cukup dekat dengan perut kamu dan dapat menonjolkan perutmu ketika buncit.

Jadi, carilah baggier t-shirt dress yang memiliki sedikit ruang di bagian pinggul kamu.

7. Wrap Dress

Model terakhir yang bisa kamu kenakan adalah model pakaian wrap dress! Model gaun satu ini menampilkan penampilan yang elegan dan dewasa.

Wrap dress juga memberikan efek tampilan ultra slimming, karena menampilkan pinggul kita yang terlihat ramping melalui tali yang ada dibagian perut. Kamu bisa menyesuaikan dan mengikatnya dengan longgar atau kencang. (nei,ist/dya)



Taburan 'Pemanis' ... (dari Hal 1)

MENKO Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan yang mendasari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yakni untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tersebut merupakan amanah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Airlangga mengatakan, hal ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Bapak Presiden, baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi," jelasnya saat konferensi pers, Senin (16/12/2024).

Program unggulan Prabowo yang disebutkan Airlangga yakni salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditengarai perlu pendanaan jumbo, untuk tahun depan saja alokasinya Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

"Di samping itu penting juga untuk berbagai program infrastruktur pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makan bergizi," imbuh Airlangga.

Airlangga memastikan, kebijakan perpajakan ini menjunjung tinggi prinsip adil, gotong royong, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah memutuskan untuk membuat paket stimulus dan insentif untuk meredam dampak PPN 12 persen.

"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga, dan pasokan bahan pokok dan ujungnya seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini seluruhnya diberlakukan 1 Januari 2025," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen negara untuk menjaga seluruh masyarakat dan perekonomian, maka APBN harus terjaga sehat dan berkelanjutan.

"Maka kewajiban kami untuk menjaga APBN itu tetap terjaga sehat. Dengan tiga fungsi yang penting, yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan distribusi," ungkapnya.

Sri Mulyani melanjutkan, APBN penting untuk menjaga stabilitas apalagi karena geopolitik dan kenaikan harga komoditas, di sisi lain juga sebagai fungsi distribusi untuk mewujudkan azas gotong royong dan keadilan.

"Yang mampu membantu dan membayar, yang tidak mampu dia dibantu dan dilindungi," tegas Menkeu.

APBN, lanjut dia, juga menjadi instrumen untuk berbagai fungsi

ekonomi, sosial, hingga lingkungan untuk memperbaiki inklusivitas. Kemudian, APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi masalah-masalah struktural.

Menkeu menjelaskan, salah satu instrumen yang menentukan pendapatan negara dalam APBN adalah perpajakan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU HPP yang disepakati oleh unsur pemerintah bersama DPR.

"UU HPP didesain karena kita tahu internasional juga bergerak dari sisi global taxation regime. Maka kita harus bisa melindungi dan menjaga basis perpajakan kita. Sementara kondisi ekonomi Indonesia tentu tidak sama dengan negara-negara lain dan siklus global," jelasnya.

Dengan demikian, Sri Mulyani menilai pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara menjaga perekonomian dalam negeri dan pada saat yang sama antisipatif terhadap perubahan dan pergerakan yang terjadi baik di regional maupun global.

UU HPP, menurutnya, menjadi landasan pemerintah untuk terus melakukan reformasi di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak.

"UU HPP adalah UU untuk mencapai penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan negara kita. Jadi mengumpulkan penerimaan negara itu adalah untuk tujuan bersama. Untuk tujuan membangun karena banyak sekali aspek pembangunan yang masih membutuhkan dukungan APBN," kata Sri Mulyani.

Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta air.

Sementara untuk tepung terigu dan minyak goreng hanya akan dikenakan PPN sebesar 11%. "Jadi tidak naik ke 12%, begitu juga tepung terigu dan gula industri," jelasnya.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan tarif yang di level 11% saja sejak April 2022, sebetulnya tarif PPN Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara lain, khususnya 13 negara yang tarif PPN nya di atas 12%.

"Tarif PPN di Indonesia dibanding banyak negara di dunia masih relatif rendah, kalau kita lihat baik di dalam kelompok negara-negara yang sesama emerging markets, atau dengan negara di region ataupun G20," kkatnya.

Sri Mulyani menyebutkan, negara-negara yang tarif PPN nya lebih tinggi di atas Indonesia di antaranya ialah Brazil sebesar 17%, Afrika Selatan 15%, India 18%, Turki 20%, dan Meksiko 16%. Dengan tarif PPN yang di atas 12% itu, ia

mengatakan, negara-negara tersebut mampu menikmati rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio jauh di atas Indonesia yang di kisaran 10,4%.

Ia menyebutkan, untuk tax ratio terhadap PDB Brazil saja mencapai 24,67%, Afrika Selatan 21,4%, India 17,33%, Turki 16,4%, dan Meksiko 14,49%. Untuk Filipina saja yang tarif PPN nya sebesar 12% mampu menikmati tax ratio sebesar 15,61%.

"12% itu adalah Filipina dan tax ratio mereka sudah 15,6% dan Meksiko PPN nya 16% tax ratio di 14,46%. Jadi Indonesia ini dengan 11% tax ratio kita masih 10,4%, ini bisa memberi gambaran PR dan perbaikan yang harus kita lakukan, tidak harus kita naik setinggi lain tapi gambarkan posisi Indonesia," ucap Sri Mulyani.

Tiga Kebijakan untuk Kelas Bawah

Untuk merespons kenaikan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat di setiap golongan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, untuk masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan "pemanis" ke dalam tiga bentuk kebijakan.

Pertama, pemerintah memberikan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen terhadap tiga barang pokok penting, yakni minyak kita, tepung terigu, dan gula industri.

Dengan demikian, Airlangga bilang, tarif PPN ketiga barang pokok penting itu tetap 11 persen atau tidak mengalami kenaikan.

"Pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen untuk barang kebutuhan pokok dan penting," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen untuk barang kebutuhan pokok dan penting," sambungnya.

Kemudian, pemerintah bakal memberikan bantuan pangan atau beras sebesar 10 kilogram (kg) per bulannya selama dua bulan. Bantuan tersebut bakal diberikan kepada 16 juta penerima yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM).

Terakhir, pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik untuk masyarakat dengan listrik terpasang di bawah 2.200 volt ampere (VA). "Diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk dua bulan," kata Airlangga.

Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025,

potensi tambahan penerimaan negara sepanjang tahun depan mencapai Rp 75 triliun.

"Itu sekitar Rp 75 triliun (potensi penerimaan) dari PPN (12%) nya," kata Febrio di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Sementara itu, total estimasi anggaran yang dikeluarkan untuk 15 insentif fiskal dalam paket kebijakan ekonomi akan mencapai Rp 40 triliun. "Tadi kan banyak ada sekitar 15 fasilitas ya untuk industri otomotif itu totalnya sekitar Rp 30-40 triliun," tegas Febrio.

Mobil Hybrid Dikecualikan

Di sisi lain, meski kenaikan PPN diberlakukan atas barang-barang kategori mewah, ada barang mewah yang justru mendapat insentif berupa PPN yang ditanggung pemerintah (PPNDTP). Yaitu, mobil hybrid.

Airlangga memaparkan, pemerintah akan kembali memberikan insentif atau fasilitas stimulus untuk jenis hybrid maupun mobil listrik (electric vehicles/ EV), yang diimpor dalam bentuk utuh (completely built up/ CBU) maupun terurai lengkap (completely knocked down/ CKD), termasuk insentif yang berdasarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

"Dan, masih dilanjutkan PPNBM ditanggung pemerintah untuk EV atas impor roda tertentu CBU dan roda empat tertentu yang CKD. Sesuai program yang sudah berjalan, juga masih diberikan pembebasan bea masuk EV CBU," sebutnya.

"Terbaru adalah PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah ini PPN untuk hybrid pemerintah memberikan diskon atau ditanggung pemerintah sebesar 3%," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, pemberian insentif atau fasilitas stimulus itu ditujukan untuk menopang daya beli warga RI.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif maupun stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk sektor otomotif tersebut adalah merupakan jawaban pemerintah.

Di mana, imbuh dia, PPNBM DTP untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan PPN DTP untuk KBLBB diberikan. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan ini meng-cover stimulus atau insentif untuk sisi permintaan dan sisi suplai yaitu produsen atau pabrikan.

Kita ketahui bersama sektor otomotif sekarang memang mengalami tekanan, dengan sales yang tertekan. Ada pandangan yang mengatakan penurunan sales otomotif diakibatkan turunnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah," kata Agus. (wid, rls, ant, tmo, din/dya)

Ketua KPK Baru Tegaskan OTT Tetap Dipertahankan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyo menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT akan tetap dilakukan. Sebab, hal itu merupakan salah satu rangkaian kewenangan yang dimulai dari penyadapan.

"Salah satu kewenangan KPK itu bisa melakukan penyadapan. Untuk apa kalau kami punya kewenangan penyadapan, tapi tidak melakukan OTT?," ujar Setyo usai dilantik menjadi Ketua KPK di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (16/12/2024). "Itu kan rangkaian dari penyadapan."

KPK di bawah kepemimpinannya akan berpedoman pada tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Untuk program KPK ke depan, ia mengatakan, terlebih dulu berdiskusi dengan komisioner KPK yang lain. "Kami akan coba bahas dahulu karena masing-masing punya visi," kata Setyo.

Ia berkomitmen memprioritaskan dan menyelesaikan kasus-kasus yang belum tuntas. "Kami akan lihat mana yang macet, mana yang mandek, nanti diprioritaskan," ujar dia.

Setyo Budiyo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR pada November lalu menyatakan akan tetap mempertahankan OTT sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi. Polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini menjelaskan perdebatan soal OTT KPK yang muncul belakangan ini lebih kepada persoalan istilah.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak—yang kembali terpilih—sempat menyatakan akan menghapus OTT jika Komisi Hukum DPR RI memilihnya sebagai pimpinan KPK. "Sebenarnya, kan, ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, nomenklatur," ucapnya.

Penjelasan substansi OTT sebagai bagian penyelidikan untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi, kata Setyo, telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexandre Marwata. "Beliau sampaikan bahwa ini penamaan," ujarnya.

Setyo, yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK, meyakini para pimpinan Komisi Antirasuah periode 2024-2029 yang terpilih akan menyetujui OTT tetap dipertahankan. Sebab, kata dia, OTT dapat menjadi strategi ampuh yang digunakan KPK untuk membongkar kasus korupsi yang besar.

Dia menuturkan akan merumuskannya lebih lanjut sehubungan dengan mekanisme penerapan OTT bersama empat pimpinan KPK periode 2024-2029 terpilih lainnya secara kolektif kolegial. "Kami berlima nanti akan membahas lebih selektif lagi, lebih



Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029, Senin (16/12/2024). Ant

detail lagi, bagaimana bisa lebih bagus, yang lebih bisa mengungkap kasus yang lebih besar," ujar dia.

Dewas Monitoring 3 Bulan Sekali

Sementara, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Gusrizal menyebut pihaknya akan sesering mungkin memonitor evaluasi tugas pimpinan KPK. Menurutnya, monitoring evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali.

"Kami hanya tugas melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas KPK tersebut. Itu yang kami lakukan terhadap hal ini. Mungkin dalam undang-undang tersebut masalah evaluasi maupun tugas tanggung jawab dari pimpinan KPK itu kan dilakukan sekali setahun. Tapi asal masalah monitoring evaluasi itu nggak boleh sekali setahun, minimal harus sekali enam bulan atau sekali tiga bulan," kata Gusrizal kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Maka oleh sebab itu jika terjadi satu pelanggaran secepatnya kita tindak lanjuti. Jadi jangan sampai pada bulan atau tahun yang akan datang

akan terjadi lagi pelanggaran tersebut," lanjut Gusrizal.

Lebih lanjut, Gusrizal mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap kode etik KPK. Ia akan kerja sama dengan Deputi Pencegahan dan Pendidikan.

"Jangan sampai terjadi pelanggaran kode etik maupun undang-undang terhadap pelaksanaan tugas dari insan KPK tersebut. Saya ingin menjaga marwah KPK. Sebetulnya Dewas ini kan insan KPK juga. Satu bagian tidak terpisah dengan pimpinan KPK, cuma bagian kami ada masalah tentang pengawasan kode etik terhadap pimpinan maupun insan KPK tersebut," ujarnya.

Meski begitu, Gusrizal mengatakan pengawasan kode etik pimpinan KPK bukan hanya dilakukan oleh Dewas. Tapi juga semua pihak bisa turut melakukan pengawasan.

"Maka oleh sebab itulah, kita kerjasama yang terbaik. Jika perlu kita ikut sertakan pimpinan KPK tersebut untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kode etik, bukannya tugas Dewas

Pimpinan KPK 2024—2029

Ketua :



Setyo Budiyo

Wakil Ketua



Johanis Tanak



Fitroh Rohcahyanto



Agus Joko Pramono



Ibnu Basuki Widodo

Dewan Pengawas KPK 2024—2029

Ketua :



Gusrizal

Anggota:



Benny Jozua Mamoto



Chisca Mirawati



Wisnu Baroto



Sumpeno

saja. Jadi kita kerjasama dengan mereka, jangan sampai jadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut," ucapnya.(wid, rls, ant, din/dya)

Pengamat: Jangan Tebang Pilih

KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda Orin Gusta Andini mengungkapkan sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.

Orin menjelaskan sebenarnya dirinya tidak menaruh harapan besar kepada pimpinan KPK yang baru dilantik. Pasalnya, ia menilai komposisi pimpinan yang diisi polisi, jaksa, dan auditor BPK, serta posisi KPK yang berada di rumpun eksekutif membuat KPK tidak bergerak lincah dalam menjalankan tugasnya.

"Sebenarnya tidak terlalu besar harapan terhadap apa yg akan dilakukan

oleh lembaga itu saat ini, selain soal komposisinya, masalahnya juga pada substansi hukum secara kelembagaan yang sudah tidak ideal lagi sejak direvisi," kata Orin, Senin (16/12/2024).

Namun demikian, Orin mengaku juga ingin KPK menjalankan tugasnya dengan baik. Pertama, ia berharap KPK mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi.

"Kedua, KPK tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum dan tidak menjadi alat untuk melayani kepentingan pihak tertentu," kata Orin.

Selanjutnya, ia berharap tak ada lagi pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan pimpinan dan karyawan KPK. Ia mengatakan hal tersebut dapat mencederai dan mencoreng nama KPK di mata publik.

"Mulai dari pegawai hingga pucuk

pimpinan tidak mengulang lagi perilaku buruk melanggar etik dan juga peraturan hukum yang ada," katanya.

Selain itu, ia meminta pimpinan KPK turut aktif mengawal perubahan revisi UU KPK, UU Pemberantasan Tipikor, dan RUU Perampasan Aset yang disuarakan sejak lama. Terakhir, ia meminta pimpinan KPK bekerja keras untuk menaikkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

Adapun Riset Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dilakukan Transparency International mencatat bahwa Indonesia kembali meraih skor 34, sama dengan perolehan Indonesia di tahun 2022. Namun peringkat Indonesia menurun ke peringkat 115 dari 180 negara. Sedangkan di tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara.(med, ist/dya)